SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN Di INDONESIA

RIZKI FEBRIVINANDA PUTRA

rizkifputra2002@gmail.com

2010003600303

UNIVERSITA EKASAKTI

abstrak

Memilih pemimpin atau kepala negara untuk menjalankan suatu sistem pemerintahan, merupakan suatu sikap politik yang sangat penting. Dalam memilih pemimpin, ada banyak mekanisme yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Di Indonesia, sebelum dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004, presiden secara periodik dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yaitu suatu lembaga politik yang memiliki kedudukan tinggi dalam konstitusi Indonesia sebelum dilakukan amandemen tahun 2000-2003.

Sesuai dengan perkembangan demokrasi, pada tahun 2014 presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan dasar Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Adapun sifat dari pemilu 2014 adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Melalui mekanisme tersebut, rakyat bebas menggunakan hak politiknya (hak memilih) untuk menentukan pemimpin yang terbaik bagi mereka.

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam sistem pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 beserta variabel-variabel yang mendorong berlakunya UU No. 42 tahun 2008.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun bukan merupakan sebuah negara Islam. Sistem pemerintahannya adalah Republik presidensial yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam menjalankan roda pemerintahan, negara ini dipimpin oleh seorang Presiden sebagai Kepala negaranya yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Sejak tahun 2004, pemilihan Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia melalui sebuah proses yang disebut dengan Pemilihan Umum atau Pemilu. Sebelum tahun 2004, pemilihan Presiden dilakukan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sebelumnya juga dipilih melalui proses Pemilu. Pemilihan langsung merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat secara riil.

Pengalaman selama ini mengajarkan bahwa pemilihan tidak langsung (*indirect election*) cenderung mengabaikan aspirasi rakyat dan distorsi-

distorsi atau manipulasi nilai-nilai demokrasi, seperti *money politic*, politik dagang sapi, kesimpangsiuran, kriteria tidak transparan dan tidak demokratis. Pemilihan presiden RI 1999 merupakan contoh baik munculnya banyak distorsi itu. Saat itu Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh 700 (tujuh ratus) anggota MPR. PDI-P yang memenangkan Pemilu 1999 dengan suara terbesar 33,76 % tidak mampu mengatasi permainan yang dilakukan oleh koalisi partai-partai Islam (poros tengah) sehingga gagal menjadikan Megawati sebagai Presiden. Abdurrahman Wahid dari PKB, partai yang hanya meraih 12,62 persen suara, justru terpilih sebagai Presiden, dengan konsekuensi harus mengakomodasi kepentingan-kepentingan pendukungnya untuk duduk di kabinet. Hal itu melengkapi kenyataan bahwa sejak awal tidak jelas kriteria calon Presiden dan Wakil Presiden.

Ali Masykur Musa menyebutkan beberapa argumentasi penting terkait pemilihan Presiden secara langsung. Argumentasi itu adalah: 1) rakyat secara langsung dapat menggunakan hak-haknya secara utuh; 2) wujud nyata asas pertanggung jawaban dan akuntabilitas; 3) menciptakan suasana kondusif bagi terciptanya hubungan yang sinergis antara negara dan rakyat.

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota

DPRD yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pilkada pada dasarnya sama dengan pilpres. Keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung. Pilkada dilakukan untuk memilih kepala daerah. Kepala daerah tersebut antara lain Gubernur-wakil gubernur, Bupati-wakil bupati, dan Wali kota-wakil wali kota.

Pilkada dilakukan pada lingkup tertentu. Pemilu dan pilkada di indonesia dilaksanakan 5 tahun sekali, jadi untuk menambah wawasan peserta didik proses pemilu dan pilkada diajarkan sejak mereka duduk dibangku sekolah dasar walaupun mereka belum bisa memilih setidaknya mereka sudah mengetahui dan memahami apa itu pemilu dan pilkada dan nanti setelah mereka sudah berusia 17 tahun mereka sudah memiliki dasar pengetahuan sehingga mereka tinggal mempraktekannya. Adapun syarat-syarat agar bisa mengikuti pemilu dan pilkada ialah warga negara indonesia, telah berusia 17 tahun ataupun sudah pernah menikah, sehat jasmani dan rohani, dan tidak sedang terkasus pidana. Dalam penyelenggaraan pemilu ada beberapa tahapan yaitu: pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu.

B. PEMBAHASAN

Indonesia termasuk negara yang telah mengalami transisi politik besar-besaran secara berulang, demokrasi di negeri ini juga mengalami pasang surut yang cukup signifikan. Tak beda dengan kecenderungan umum di banyak negara, perubahan politik serta naik-turunnya kualitas demokrasi di negara ini juga berimplikasi pada penyelenggaraan pemilu.

Keluhan-keluhan utama tentang kualitas demokrasi di masa pemerintahan Orde Baru antara lain dialamatkan pada penyelenggaraan pemilu yang intimidatif dan penuh kecurangan. Sebaliknya, kebanggaan pada era reformasi pun senantiasa direfleksikan pada kemampuan bangsa kita untuk menyelenggarakan pemilu multi-partai yang bebas, jujur dan adil semenjak tahun 1999.

Meskipun demikian, pemilu di Indonesia tak selalu mudah dipahami oleh publik umumnya dan para pemilih khususnya. Regulasi yang senantiasa berubah-ubah memberikan kontribusi sangat besar terhadap munculnya kebingungan akan system dan tata cara pemilu kita. Selain karena kesalahan cara pandang dan prilaku orang atau manusia, keterpurukan suatu negara juga dapat disebabkan oleh pihak pemerintah yang antara lain adalah:

- 1) Kegagalan dalam memilih model pemerintahan.
- 2) Kegagalan pemerintahan dalam memainkan peran sebagai penjaga kepentingan bersama.
- 3) Kegagalan pemerintah dalam membangun suatu penyelenggaraan pemerintah yang baik; dan
- 4) Terjadinya penyimpangan dan penyelewengan terhadap berbagai ketentuan formal dibidang politik.

Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan diselenggarakan pada setiap lima tahun sekali, serta dilaksanakan di seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pemilu Presiden dan pemilu legislatif tentu sangat beda. Pemilu presiden secara proses dan pencalonan sangat sederhana, sehingga secara teknis memudahkan pemilih memilih dan memudahkan penyelenggara

menjalankan tugas pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi. Menjelang pelaksanaan Pilpres, 9 Juli 2014 terlihat masalah yang muncul antara lain: dana kampanye, black campaign, money politic.

Tujuan diselenggarakannya pemilu dan pilkada adalah sama-sama untuk mewujudkan demokrasi. Namun demikian, ada beberapa perbedaan antara pemilu dan pilkada, pemilu ditujukan untuk memilih wakil rakyat ditingkat pusat dan daerah. Adapun pilkada ditujukan untuk memilih kepala daerah. Pemilu dilaksanakan serentak diseluruh wilayah indonesia, adapun pilkada dilaksanakan hanya dalam lingkup wilayah pemerintahan daerah tertentu saja. Proses pelaksanaan pemilu dan pilkada makanya berbeda, berikut akan dijelaskan proses dan pelaksanaan/penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

1. Penyelenggaraan Pemilu di indonesia

Pemilu diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum (KPU). KPU ada yang berkedudukan di pusat ada yang di daerah. Kpu pusat bertugas mengurus pelaksanaan pemilu di tingkat nasional. Adapun kpu ditingkat daerah bertugas menyelenggarakan pemilihan ditingkat daerah atau disebut pilkada.

Penyelenggaraan pemilu telah diatur dalam uu no. 22 tahun 2007. Dari undang-undang tersebut diketahui bahwa pemilu di negara kita

dilaksanakan dalam tiga tahapan. Tahap pertama dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Anggota DPRD yang dipilih meliputi para wakil rakyat yang duduk di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, tahap kedua adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, tahap ketiga yaitu pemilihan kepala daerah dan wakilnya. Pelaksanaan pemilihan wakil rakyat seperti DPR, DPD, DPRD, diatur dalam UU No 10 Tahun 2008

Penyelenggara pemilu meliputi beberapa kegiatan yaitu kegiatan pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, kampanye peserta pemilu serta pemungutan dan penghitungan suara.

- a. Pendaftaran Pemilih Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas khusus, petugas tersebut mendaftarkan pemilih dengan mendatangi kediaman calon pemilih.

berhak memilih harus memenuhi beberapa persyaratan, berikut beberapa persyaratan agar dapat menjadi pemilih dalam pemilu:

- 1) Pemilih adalah seluruh warga negara indonesia. Warga negara tersebut termasuk yang berada di luar negeri.
- 2) Pemilih telah berusia minimal 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah. Pemilih yang belum berusia 17 tahun tetap tetapi bila sudah atau pernah menikah dapat memiliki hak pilih.
- 3) Sehat jasmani dan rohani, orang yang mengalami gangguan jiwa tidak mempunyai hak pilih.
- 4) Tidak sedang dicabut haknya karena kasus pidana dan berdasarkan putusan pengadilan.

Semua orang yang terdaftar kemudian di umumkan oleh panitia pemungutan suara (PPS). Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui siapa saja yang memiliki dan tidak memiliki hak pilih. Apabila ada yang belum terdaftar mereka dapat segera mendaftarkan diri. Para pemilih yang telah terdaftar akan mendapatkan kartu pemilih.

b. Pendaftaran Peserta Pemilu

Pendaftaran juga dilakukan terhadap para peserta pemilu. Peserta pemilu adalah pihak yang akan dipilih oleh rakyat. Peserta pemilu terdiri dari atas partai politik dan perseorangan. Partai yang dapat menjadi peserta harus memenuhi persyaratan tertentu, berikut persyaratan pemilu:

- 1) Keberadaannya diakui pemerintah sesuai uu no 31 tahun 2002 tentang partai politik.
- 2) Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh jumlah provinsi
- 3) Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh jumlah kabupaten di tiap provinsi

- 4) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 dari jumlah penduduk di setiap kepengurusan partai.
- 5) Pengurus partai politik harus memiliki kantor tetap.
- 6) Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik ke kpu.

c. Penetapan Peserta Pemilu

Penetapan nomor urut pada politik peserta pemilu dilakukan melalui undian oleh KPU dan dihadiri oleh seluruh partai politik peserta pemilu.

d. Kampanye

Sebelum dilakukan pemungutan suara, partai politik peserta pemilu diberikan kesempatan untuk berkampanye. Pada kampanye pemilu rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye. Pelaksanaan kampanye pemilu dilaksanakan .

Sejak 3 hari setelah calon peserta ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang, masa tenang yang dimaksud berlangsung 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Materi kampanye

pemilu berisi program peserta pemilu, dalam menyampaikan materi kampanye hendaknya dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan mendidik. 15 Sunarso dan Anis Kusumawardani, pendidikan kewarganegaraan untuk SD dan MI kelas VI, (Jakarta: CV.Grahadi, 2008), hlm.22-23

e. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan oleh KPU. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon. Penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara berakhir.

PENUTUP

Pemilu adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu. Untuk itu pemilihan umum sangat penting karena dalam pemilu terjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pilkada dilakukan untuk memilih kepala daerah. Pilkada pada dasarnya sama dengan pilpres. Keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung. Ada enam asas pemilu di Indonesia, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tujuan diselenggarakannya pemilu dan pilkada adalah sama-sama untuk mewujudkan demokrasi. Pemilu dilaksanakan serentak diseluruh wilayah indonesia, adapun pilkada dilaksanakan hanya dalam lingkup wilayah pemerintahan daerah tertentu saja.

DAFTAR PUSTAKA

Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi

Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018.

Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana,*

Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Laurensius Arliman S, *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di*

Daerah Perbatasan Indonesia, Jurnal Selat, Volume 4, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, *Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai*

Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman, Justicia Islamica, Volume 13, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplorasi Secara Ekonomi*

Oleh Pemerintah Kota Padang, Veritas et Justitia, Volume 2, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-*

Undangan Di Indonesia, Lex Jurnalica, Volume 13, Nomor 3, 2016.

Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxiliary Bodies Dalam Penegakan*

Ham Perempuan Indonesia, Justicia Islamica, Volume 14, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di*

Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan*

Indonesia

Sebagai Negara Hukum, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights*

In The Area Of Social Conflict, The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon), Volume 1, 2017.

Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

Laurensius Arliman S, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, Jurnal Respublica Volume 17, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial*, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, *Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020,

<http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, No Nomor, 2020.

Larensius Arliman S, *Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika*, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779).

Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, *Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia*, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, *Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada

Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial

Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.